

## PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN MODEL BISNIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Karel Michael Martin  
Totok Dewayanto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the relationship between Corporate Governance, and Business Models on Tax Avoidance in manufacturing companies in Indonesia. Corporate Governance is divided into seven sections Executive Compensation, Executive Character, Firm Size, Institutional Ownership, Board of Commissioner, Audit Committee, and Audit Quality.*

*The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2016 - 2018. The sampling method used in this study is purposive sampling. The number of samples used in this study were 113 research samples. The data used in this study were obtained from the company's annual report. The data in this study were analyzed using multiple regression techniques. Data in this study were also analyzed using the classic assumption test before being analyzed using multiple regression techniques. The results of this study indicate that Executive Character, Institutional Ownership, Board of Commissioner, Audit Committee, and Audit Quality and Business Models do not conflict with Tax Avoidance, while Executive Compensation and Firm Size affect Tax Avoidance.*

*Keywords: Tata Kelola Perusahaan, Model Bisnis, Penghindaran Pajak*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah elemen penting yang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan suatu negara. Dalam survey yang dilakukan oleh penyidik IMF, Ernesto Crivelly, pada tahun 2016 dan telah di Analisa kembali oleh universitas PBB dengan database *International Center for Policy and Research (ICPR)* dan *International Center for Tax and Development (ICTD)* terhadap perusahaan yang ada didalam 30 negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi perusahaan 11 dari 30 negara dengan kerugian sebesar US\$ 6,48 miliar akibat aktivitas penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, pendapatan negara disektor pajak merupakan presentase terbesar sumber pendapatan negara. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

Wajib pajak tidak hanya berbicara tentang Individu melainkan ada juga yang sifatnya dalam bentuk organisasi atau perusahaan. Perusahaan juga merupakan wajib pajak yang seharusnya secara rutin membayarkan jumlah pajak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun di sisi lain, perusahaan menganggap pajak ini merupakan beban yang dimiliki oleh perusahaan dimana beban ini dapat mengurangi jumlah laba yang akan diterima oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya perusahaan yang berusaha untuk mencari cara untuk meminimalisir jumlah pajak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak terminimalisir secara signifikan akibat jumlah pembayaran wajib pajak yang dimiliki cukup tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak ini dilakukan tanpa melanggar hukum yang berlaku sehingga penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat dilihat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar perusahaan yang dimilikinya berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dan perusahaan tersebut dapat bersaing dengan persaingan bisnis global. Tata kelola perusahaan, menurut *Indonesia Institute Corporate Governance* dalam Winarsih *et al* (2014), adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah dalam meningkatkan kestabilan perusahaan yang dapat bermanfaat hingga jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki sistem tata kelola yang baik maka perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta pemangku kepentingan yang tertarik untuk menanamkan sahamnya didalam perusahaan tersebut dapat percaya dengan kualitas dari perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak dimana penghindaran pajak dapat dihindari jika didalam perusahaan tersebut memiliki sistem tata kelola yang sangat baik. Dalam literatur dikatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan manajemen pajak didalam perusahaan yang dihubungkan dengan biaya agensi dan biaya pelaporan (Desai dan Dharmapala; 2009).

Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi yang penting bagi sebuah perusahaan (Cai dan Liu; 2009; Hanlon dan Heitzman; 2010). Secara tradisional, diyakini bahwa penghindaran pajak perusahaan merupakan transfer kekayaan dari pemerintah ke perusahaan dan harus meningkatkan *Value* dari perusahaan. Desai dan Dharmapala (2009) menemukan bahwa efek keseluruhan dari kegiatan penghindaran pajak perusahaan pada nilai perusahaan tidak berbeda secara signifikan dari nol. Efeknya hanya positif bagi perusahaan dengan kepemilikan institusional tingkat tinggi.

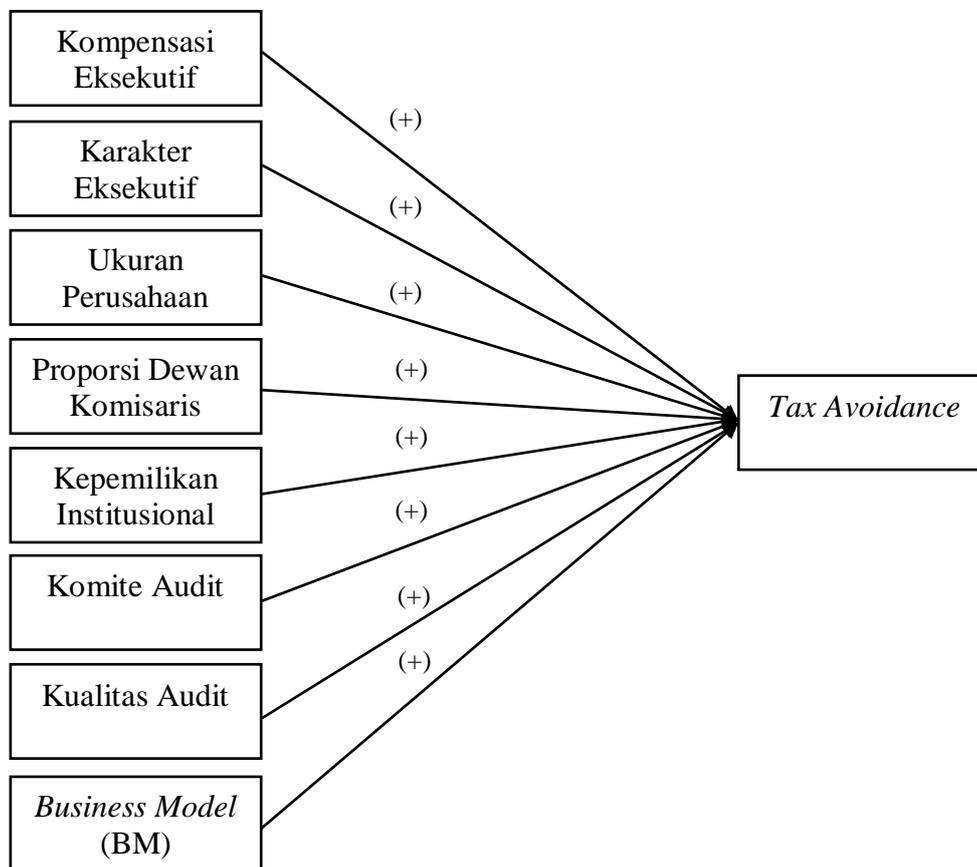
*Value Creation* memiliki hubungan yang cukup erat dengan model bisnis dimana model bisnis dapat mengartikulasi bagaimana sebuah perusahaan dapat mengkonversi sumberdaya perusahaan dan kapabilitasnya menjadi sebuah nilai ekonomi (Teece; 2010) Model ini dapat menunjukkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan berbagai macam model untuk menciptakan sebuah nilai bagi perusahaan. *Business Model* (BM) adalah inti dalam pembentukan suatu kerangka laporan dan menunjukan dengan jelas

menunjukkan bahwa model yang dibentuk dapat membantu menunjukkan identifikasi dari pengungkapan yang tidak ditunjukkan secara rinci (Beattie dan Smith; 2013).

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan mengenai hubungan antara *Corporate Governance* dan Model Bisnis terhadap Nilai Perusahaan. yang menjadi variabel independen yaitu *Corporate Governance* yang terdiri dari Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit dan Model Bisnis dan variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.



Gambar I

### Kerangka Pemikiran

Gambar I. merupakan kerangka pemikiran teoritis

## II. Hipotesis

Kompensasi Eksekutif merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer dari perusahaan sebagai bentuk apresiasi dari hasil keinerja yang telah dilakukan oleh manajer dan pencapaian yang telah dicapai dalam proses pelaksanaan aktivitas perusahaan. Kompensasi ini bukan bagian dari dalam pendapatan wajib yang diterima oleh manajer secara terus menerus, Dalam perusahaan yang ada Indonesia, pemberian kompensasi kepada manajer atas hasil kinerjanya diberikan dalam bentuk bonus yang dapat diterima ketika ada pencapaian yang telah dihasilkan. Pemberian Kompensasi oleh perusahaan terhadap pencapaian yang telah dicapai ini dapat memberikan motivasi bagi manajer untuk meningkatkan performa dari perusahaannya, tanpa adanya keinginan untuk melakukan penghindaran pajak.

### ***H1. Kompensasi Eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.***

Seorang pemimpin perusahaan merupakan cerminan bagaimana perusahaan tersebut akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Manajer dalam perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar target yang dimiliki tersebut tercapai dan perusahaan dapat menerima profit yang tinggi dari target tersebut. Seorang manajer dalam pengambilan keputusannya, terbagi menjadi dua jenis karakteristik, yaitu *Risk Taker* dan *Risk Averse*. *Risk Taker* merupakan suatu sika yang di tunjukan oleh manajer dimana dalam pengambilak keputusan untuk perusahaan ia tidak ragu untuk mengambil resiko dari keputusan yang dipilih. Sedangkan seorang pemimipin yang memiliki gaya kepemimpinan *Risk Averse* merupakan gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin cenderung lebih hati-hati dalam menimbang resiko yang akan diterima ketika mengambil keputusan bagi perusahaan.

Pemimipin dengan gaya kepemimpinan *Risk Taker* yang biasanya berani dalam mengambil keputusan dalam bisnisi biasanya menginginkan pendapatan, posisi, kekayaan, dan otoritas yang lebih tinggi (Macrimmon dan Wehrung dalam Budiman, 2012) Seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan *Risk Taker* ini cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran dalam perusahaan.

### ***H2. Karakter Eksekutif memiliki hubungan positif terhadap Penghindaran Pajak.***

Sebuah ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan melalui total aset perusahaan, pendapatan bersih hasil penjualan perusahaan, dan kekuatan pasar modal perusahaan tersebut (Fitriani dalam Andhika, 2010). Menurut ukurannya, sebuah perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu perusahaan dengan skala besar dan perusahaan dengan skala kecil. Perusahaan dengan skala besar ini cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan akun dalam perusahaan yang

bersifat lebih kompleks. Perusahaan dengan skala lebih besar, dikarenakan laba perusahaan yang lebih tinggi, cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam penjelasan teori agensi dimana pemilik perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi jumlah laba dalam perusahaan untuk dapat menghindari biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan.

### ***H3 Ukuran Perusahaan memiliki hubungan positif terhadap aktivitas Penghindaran Pajak.***

Kepemilikan Institusional dalam perusahaan merupakan proporsi kepemilikan terhadap perusahaan dari pemilik institusional dan *Blockholders* pada akhir tahun (Simarmata dan Cahyonowati; 2014; Wahyudi dan Pawestri; 2006). Adanya kepemilikan Institusional dalam perusahaan akan membantu adanya peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan sehingga kinerja dari perusahaan itu sendiri dapat menjadi lebih efektif dan maksimal. Kepemilikan Institusional itu sendiri menurut (Permanasari; 2010) merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perbankan, asuransi, perusahaan investasi, dan lainnya. Dalam aktivitasnya, kepemilikan institusional ini memiliki fungsi *monitoring* jika dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Menurut Khurana dan Moser (2011) dalam penelitian yang dilakukan olehnya, di temukan bahwa kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penghindaran pajak. Namun hal yang berkebalikan ditemukan oleh Winata (2014) dimana dalam penelitian yang dilakukan olehnya, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pelaksanaan penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan.

### ***H4 Kepemilikan Institusional memiliki hubungan positif terhadap aktivitas Penghindaran Pajak.***

Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan merupakan tingkatan kedua tertinggi dibawah pemegang saham perusahaan. Peran dari dewan komisaris ini adalah menjadi bagian dari manajemen dalam melaksanakan perencanaan serta pengawasan terhadap kinerja dari perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadikan dewan komisaris sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadikan dewan komisaris juga sebagai pemegang posisi utama dalam sistem tata kelola dalam perusahaan. Dewan Komisaris harus dapat memastikan apabila perusahaan tersebut melaksanakan aktivitas tata kelola perusahaan dengan baik.

Dalam jajaran dewan komisaris perusahaan terdapat komisaris independent yang ditunjuk oleh pemegang saham independent untuk melakukan pengawasan didalam perusahaan. Adanya komisaris independent dalam perusahaan dapat

memberikan dampak positif bagi perusahaan dan nilai perusahaan (Ying; 2011). Komisaris Independen ini juga memiliki tanggung jawab penuh kepada pemegang saham perusahaan, sehingga seorang komisaris independent akan melaksanakan pengawasan dalam perusahaan agar perusahaan tidak melakukan kecurangan.

#### ***H5 Proporsi Dewan Komisaris memiliki hubungan positif terhadap aktifitas Penghindaran Pajak.***

Komite Audit dalam sebuah perusahaan dibentuk oleh dewan komisaris yang ada didalam perusahaan. Komite Audit yang dibentuk berfungsi untuk melakukan pengecekan dan memberikan penilaian terhadap aktifitas dari perusahaan, sehingga komite audit bertanggung jawab penuh kepada dean komisaris perusahaan. Komite Audit ini dipimpin oleh komisaris independent. Anggota dari komite audit ini dapat beranggotakan komisaris dana tau tenaga ahli dari perusahaan lainnya. Anggota komite audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (LK; 2012).

Perusahaan Terbuka harus memiliki Komite Audit yang bekerja secara independent ketika melakukan kewajibannya. Komite Audit dalam perusahaan jumlahnya paling sedikit harus tiga orang, didalamnya sudah termasuk ketua komite audit yang merupakan Komisaris Independen (LK; 2012). Dalam tata kelola perusahaan, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan perusahaan telah melakukan aktifitasnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Berdasarkan aktifitasnya tersebut, komite audit dengan segala wewenangnya dapat meminimalisir perilaku kecurangan yang dilakukan terkait dengan laporan keuangan. Dengan adanya komite audit ini berarti dapat membantu perusahaan untuk mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

#### ***H6 Komite Audit memiliki hubungan positif terhadap aktifitas Penghindaran Pajak.***

Sebuah perusahaan yang ukuran perusahaannya bersifat besar, dapat dipastikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut bersifat lebih kompleks dan jumlah akun yang ada didalamnya banyak. Hal ini menjadikan perusahaan akan menggunakan jasa audit dari kantor akuntan publik yang sudah terverifikasi dan baik dalam pelaksanaan auditnya (Watts dan Zimmerman; 1983). Kualitas audit dari perusahaan dapat dilihat dari siapa yang melakukan audit dari perusahaan tersebut. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah dapat terverifikasi dan sangat dapat di percaya hasil auditnya adalah KAP *Big Four*. Dimana KAP *Big Four*, yaitu Ernst & Young (EY), Delloite, Price Waterhouse Cooper (PWC), dan KPMG ini sudah pasti bersifat transparan dan lebih dapat diandalkan hasilnya dn dapat menunjukkan nilai dari perusahaan itu sendiri dan dapat menunjukkan apakah dalam perusahaan tersebut terjadi aktifitas penghindaran pajak.

### ***H7 Kualitas Audit memiliki hubungan positif terhadap aktifitas Penghindaran Pajak***

Zott *et al.* (2011) menyatakan bahwa model bisnis adalah sebuah alat analisis baru yang membedakan produksi, perusahaan, industri, dan *network*. *Business Model* merupakan cara bagaimana perusahaan berusaha untuk menciptakan nilai, memberikan nilai bagi konsumen, dan mendapatkan nilai dari perusahaan. Dalam usahanya untuk mendapatkan nilai bagi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, sebuah model bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dapat dimodifikasi dan disesuaikan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, hal ini dinamakan sebagai inovasi BM. Inovasi BM ini dilakukan karena dalam modifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap bisnis model dalam perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai dari perusahaan lebih tinggi lagi dari sebelumnya dan mencapai keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya.

Model bisnis ini dapat dikaitkan dengan aktifitas penghindaran pajak dengan pembentukan nilai bagi perusahaan itu sendiri, dimana model bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu, aktifitas penghindaran pajak juga memiliki keterkaitan dengan aktifitas penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) ditemukan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif signifikan terhadap penciptaan nilai bagi perusahaan itu sendiri, dengan catatan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik didalamnya. Namun aktifitas penghindaran pajak ini menurunkan nilai dari perusahaan itu sendiri dikarenakan aktifitas penghindaran pajak merupakan aktifitas yang memiliki resiko yang tinggi. Meskipun hingga saat ini penelitian sebelumnya yang secara langsung menghubungkan model bisnis dan penghindaran pajak masih belum ada, peneliti ingin meneliti apakah terdapat hubungan yang terjadi antara model bisnis dengan penghindaran pajak dimana hubungan keduanya dikaitkan melalui penciptaan nilai bagi perusahaan. Model bisnis dibentuk untuk menciptakan nilai sedangkan penghindaran pajak menurut Desai & Dharmapala justru mengurangi nilai dari perusahaan itu sendiri. Sehingga peneliti ingin menghubungkan apakah adanya model bisnis yang baik bagi perusahaan akan mengurangi aktifitas penghindaran pajak dalam perusahaan.

### ***H8 Model Bisnis memiliki hubungan positif terhadap aktifitas Penghindaran Pajak***

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Sampel dan metodologi**

Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang sudah menerbitkan laporan tahunan di

web idx.co.id sampai dengan tahun 2018. Pengambilan sampel laporan tahunan perusahaan tahun 2016-2018 dan dalam rupiah.

Metode analisis menggunakan model persamaan regresi dengan metode Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat untuk menjelaskan pengujian hipotesisnya dan estimasi nilai populasi (Cooper dan Schindler; 2006)

## 2. Cara Pengukuran

No	Variabel	Cara pengukuran	
1	Penghindaran Pajak	Menggunakan proksi <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	
2	Kompensasi Eksekutif	Logaritma Natural pendapatan eksekutif perusahaan	
3	Karakter Eksekutif	Variabel Dummy, 1 menandakan <i>Risk Taker</i> , 0 menandakan <i>Risk Averse</i>	
4	Ukuran Perusahaan	Logaritma Natural total aset perusahaan	
5	Kepemilikan Institusional	Presentase kepemilikan saham dalam perusahaan	
6	Proporsi Dewan Komisaris	Pembagian jumlah dewan komisaris independent dengan total dewan komisaris	
7	Komite Audit	Jumlah komite audit dalam perusahaan	
8	Kualitas Audit	Variabel dummy, 1 menandakan KAP Big four, 0 Menandakan KAP lain	
9	Model Bisnis	Menggunakan Indeks dengan variabel sebagai berikut.	
		1	Value Proportion
		2	Target Consumer
		3	Distribution Channel
		4	Relationship
		5	Resource & Capability
		6	Value Configuration
		7	Partnership
		8	Cost Structure
9	Revenue Model		

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan periode 2016 sampai 2018 sebagai sampel data. Data penelitian bersumber dari Bursa Efek Indonesia ( BEI ).

#### 4. Metode Analisis

$$ETR = b_0 + b_1KOM + b_2RES + b_3SIZE + b_4INST + b_5INDP + b_6KOM + b_7KA + b_8BM + \varepsilon$$

ETR	: Rata-rata pajak efektif saat ini
b <sub>0</sub>	: nilai konstan
b <sub>1,2,3,4,5,6,7,8</sub> :	nilai koefisien
KOMP	: Kompensasi Eksekutif
RES	: Karakteristik Eksekutif
SIZE	: Ukuran Perusahaan
INST	: Kepemilikan Institusional
INDP	: Proporsi Dewan Komisaris
KOM	: Komite Audit
KA	: Kualitas Audit
BM	: Model Bisnis
$\varepsilon$	: Nilai residual

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini, perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sektor keuangan. Sebanyak 93 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2019 yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian ini sesuai dengan ketentuan oleh peneliti perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan sampai tahun 2019 dan dalam rupiah dalam pelaporannya dan sampel perusahaan yang dipakai sebanyak 31 perusahaan. Data penelitian yang tidak memenuhi kriteria akan di keluarkan dari sampel penelitian.

Data Hasil Penelitian Sampel

NO.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI	150
2.	Perusahaan sektor Manufaktur yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian	( 100 )
3	Sampel perusahaan sektor keuangan yang layak dijadikan sampel ( 50 X 3 )	150
4	Sampel Outlier	( 37 )
5	Sampel yang layak	113

**Statistik Deskriptif**

Pengujian dari analisis statistik deskriptif ini akan memberikan deskripsi mengenai nilai variabel dependen dan independen dengan mengetahui mean, standar deviasi, maximum, dan minimum. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat tabel dibawah ini.

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX AVOIDANCE	113	.11	.35	.2558	.03751
KOMP	113	20.15	27.63	23.8373	1.49038
SIZE	113	25.81	33.20	29.0353	1.57722
INST	113	.28	.93	.6988	.16027
INDP	113	.20	.60	.4008	.08775
KOM	113	3.00	5.00	3.0708	.29022
BM	113	.56	1.00	.8715	.11751
Valid N (listwise)	113				

Dari tabel diatas :

Penghindaran Pajak ditunjukkan dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Variable ini menunjukkan nilai minimum variable penghindaran pajak sebesar 0,11 dan nilai maksimum 0,35. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 0,2558 dan standar deviasi sebesar 0,03751. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Kompensasi Eksekutif ditunjukkan dengan nilai logaritma natural dari penghasilan yang didapatkan oleh eksekutif perusahaan. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable kompensasi eksekutif sebesar 20,15 dan nilai maksimum 27,63. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 23,8373 dan standar deviasi sebesar 1,149038. Dari data tersebut

menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Ukuran Perusahaan ditunjukkan dengan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable ukuran perusahaan sebesar 25,81 dan nilai maksimum 33,20. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 29,0353 dan standar deviasi sebesar 1,57722. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Kepemilikan Institusional ditunjukkan dengan presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable kepemilikan institusional sebesar 0,28 dan nilai maksimum 0,93. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 0,6988 dan standar deviasi sebesar 0,16027. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Proporsi Dewan Komisaris ditunjukkan dengan pembagian jumlah komisaris independent dengan total komisaris dalam perusahaan. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable kepemilikan institusional sebesar 0,20 dan nilai maksimum 0,60. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 0,4008 dan standar deviasi sebesar 0,08775. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Komite Audit ditunjukkan dengan jumlah anggota komite audit yang terdapat didalam perusahaan. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable komite audit sebesar 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 3,0708 dan standar deviasi sebesar 0,29022. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

Model Bisnis ditunjukkan dengan skoring dengan menggunakan indikator business model. Variable ini menunjukkan nilai minimum variable model bisnis sebesar 0,56 dan nilai maksimum 1,00. Rata – rata (*mean*) menunjukkan sebesar 0,8715 dan standar deviasi sebesar 0,11751. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang mengartikan adanya variasi data yang besar dimana nilai sampel berada pada posisi sebaran yang sempit dari nilai rata- rata hitungnya.

**Hasil Pengujian Hipotesis****Uji Statistik *t* Model Regresi**

<i>Model</i>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
(Constant)	,1.284	2.673	.009	
KOMP	.026	4.123	.000	Berpengaruh
RES	.014	1.040	.301	Tidak berpengaruh
SIZE	1.682	4.103	.000	Berpengaruh
INST	.024	.602	.548	Tidak berpengaruh
INDP	-.074	-1.006	.317	Tidak berpengaruh
KOM	.001	.022	.982	Tidak berpengaruh
KA	.005	.313	.755	Tidak berpengaruh
BM	-.045	-.805	.422	Tidak Berpengaruh

**Tata Kelola Perusahaan memiliki hubungan signifikan dengan Penghindaran Pajak.**

Nilai *t* pada variabel KOMP yaitu sebesar 4,123 dengan signifikansi (*sig*) sebesar 0,000 yang jika dilihat bahwa  $sig < 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji *t* KOMP terhadap penghindaran pajak diterima. Koefisien regresi dari variabel KOMP sebesar 0,000 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada KOMP akan menambah 2,6% pada penghindaran pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel KOMP berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Nilai *t* pada variabel RES yaitu sebesar 1,040 dengan signifikansi (*sig*) sebesar 0,301 yang jika dilihat bahwa  $sig > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji *t* RES terhadap Penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel RES sebesar 0,301 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada RES akan menambah 1,040 pada penghindaran pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel RES tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Nilai *t* pada variabel SIZE yaitu sebesar 4,103 dengan signifikansi (*sig*) sebesar 0,000 yang jika dilihat bahwa  $sig < 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji *t* SIZE terhadap penghindaran pajak diterima. Koefisien regresi dari variabel SIZE sebesar 0,000 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada SIZE akan menambah 4,103 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel SIZE berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Nilai  $t$  pada variabel INST yaitu sebesar 0,602 dengan signifikansi ( $\text{sig}$ ) sebesar 0,548 yang jika dilihat bahwa  $\text{sig}$  sebesar  $0,548 > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji  $t$  INST terhadap penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel INST sebesar 0,548 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada INST akan menambah 0,602 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel INST berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Nilai  $t$  pada variabel INDP yaitu sebesar -1,006 dengan signifikansi ( $\text{sig}$ ) sebesar 0,317 yang jika dilihat bahwa  $\text{sig}$  sebesar  $0,317 > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji  $t$  INDP terhadap penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel INDP sebesar 0,317 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada INDP akan menambah -1,006 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel INDP berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Nilai  $t$  pada variabel KOM yaitu sebesar 0,022 dengan signifikansi ( $\text{sig}$ ) sebesar 0,982 yang jika dilihat bahwa  $\text{sig}$  sebesar  $0,982 > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji  $t$  KOM terhadap penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel KOM sebesar 0,982 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada KOM akan menambah 0,022 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel KOM berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Nilai  $t$  pada variabel KA yaitu sebesar 0,313 dengan signifikansi ( $\text{sig}$ ) sebesar 0,755 yang jika dilihat bahwa  $\text{sig}$  sebesar  $0,755 > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa untuk uji  $t$  KA terhadap penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel KA sebesar 0,755 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada KA akan menambah 0,313 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel KA berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Sehingga, disimpulkan bahwa variabel Kompensasi Eksekutif (KOMP) dan Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan variabel Karakter Eksekutif (RES), Kepemilikan Institusional (INST), Proporsi Dewan Komisaris (INDP), Komite Audit (KOM), dan Kualitas Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Model Bisnis memiliki hubungan signifikan dengan Penghindaran Pajak**

Nilai  $t$  pada variabel Kualitas Model Bisnis (BM) yaitu sebesar -0,805 dengan signifikansi ( $\text{sig}$ ) sebesar 0,422 yang jika dilihat bahwa  $\text{sig}$  sebesar  $0,422 > 0,05$ , yang bisa diartikan bahwa uji  $t$  pada variabel BM terhadap penghindaran pajak ditolak. Koefisien regresi dari variabel BM sebesar 0,422 menyatakan bahwa peningkatan sebesar 1 pada BM akan menambah -0,805 pada Penghindaran Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel BM tidak berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti ada atau tidak hubungan antara Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Model Bisnis terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2018 secara berurutan.

Penelitian ini menggunakan konten dari laporan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018. Setelah proses pengumpulan data dan dilakukan pengolahan data, analisis data, sampai dengan interpretasi hasil dapat menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu proporsi dewan komisaris dan model bisnis memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kompensasi eksekutif serta ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

### Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik ini atau melanjutkan penelitian ini, yaitu :

1. Peneliti sebelumnya dapat menggunakan proksi lain yang dapat digunakan untuk mengukur Penghindaran Pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengganti variabel independent dengan variabel lain dalam melakukan pengukuran Tata Kelola Perusahaan.
3. Peneliti dapat mencari hubungan yang lebih dalam lagi terhadap hubungan model bisnis dengan penghindaran pajak

## REFERENSI

- Beattie, V., dan Smith, S.J. 2013. Value creation and business models: Refocusing the intellectual capital debate *Br. Account. Rev.* 45:4, 243–254.
- Budiman, J. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) SNA XV Banjarmasin.
- Cai, H., dan Liu, Q. 2009. Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms *Econ. J.*
- Cooper, D., dan Schindler. 2006. *Business research methods* (11th ed.), New York, McGraw-Hill/Irwin.
- Desai, M.A., dan Dharmapala, D. 2009. Corporate tax avoidance and firm value *Rev. Econ. Stat.*
- Desai, M.A., dan Dharmapala, D. 2006. Corporate tax avoidance and high-powered incentives *J. financ. econ.*

- Hanlon, M., dan Heitzman, S. 2010. A review of tax research *J. Account. Econ.*
- Khurana, I.K., dan Moser, W.J. 2011. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness *SSRN Electron. J.*
- LK, B. 2012. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-689/BL/2011 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK, BAPEPAM LK.
- Maccrimmon, K.R., dan Wehrung, D.A. 1985. A portfolio of risk measures *Theory Decis.*
- Permanasari. 2010. Wien\_Ika\_Permanasari Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Corp. Soc. Responsib. Terhadap Nilai Perusah.
- Simarmata, A.P.P., dan Cahyonowati, N. 2014. Pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi *Dipenogoro J. Account.*
- Teece, D.J. 2010. Business models, business strategy and innovation *Long Range Plann.*
- Wahyudi, U., dan Pawestri, H.P. 2006. Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening *Simp. Nas. Akunt. 9 Padang.*
- Watts, R.L., dan Zimmerman, J.L. 1983. Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence *J. Law Econ.*
- Winarsih, Rina; Prasetyono; Kusufi, M.S. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Tindakan Pajak Agresif *SNA 17 Mataram, Lomb. Univ. Mataram 24-27 Sept 2014.*
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 *Tax Account. Rev.*
- Ying, Z. 2011. Ownership Structure, Board Characteristics and Tax Aggressiveness *Search.*
- Zott, C., Amit, R., dan Massa, L. 2011. The business model: Recent developments and future research *J. Manage.*